



LAPORAN AKHIR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Bidang Tenaga Kerja

Program : Penempatan
Tenaga Kerja

Kegiatan : Pengelolaan
informasi Pasar Kerja

sub kegiatan : Pelayanan dan
Penyediaan informasi Pasar
Kerja Online



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Tenaga Kerja

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online telah dapat dilaksanakan untuk periode tahun anggaran 2024. Sistem Informasi Pasar Kerja merupakan informasi yang disusun secara mutakhir dan terus menerus mengenai struktur, karakteristik, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, dan informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja.

Informasi pasar kerja penting untuk membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan memfasilitasi proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, informasi pasar kerja juga dapat membantu pelaku pasar kerja dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan agar dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, menciptakan peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang berisiko kekurangan sumber daya manusia, membantu balai pendidikan dan latihan kerja.

Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pencari kerja serta dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salido, 8 Januari 2025

Ttd

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Ruang Lingkup.....	3
1.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
II.1 Bentuk Kegiatan.....	4
II.2 Pembiayaan.....	4
II.3 Keluaran, Hasil dan Capaian Kegiatan.....	4
II.4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	5
II.5 Kendala Pelaksanaan Kegiatan	5
BAB III PENUTUP	6
III.1 Kesimpulan	6
III.2 Saran	6

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Kegiatan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan tahun 2011, 182 Nagari/Desa sebagai Pemerintah terendah dan 480 Kampung/dusun dengan luas wilayah 5.749,95 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 tercatat sebanyak 516.518 jiwa, laki-laki 260.118 jiwa dan perempuan 256.400 jiwa.

Angkatan kerja di Pesisir Selatan pada tahun 2024 sebanyak 256.424 dengan rincian, Bekerja 244.236 orang dan Pengangguran 12.188 orang dan yang bukan Angkatan Kerja sebanyak 138.072 orang. Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 4,75 %.

Kondisi saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 986 orang pencari yang terdaftar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi pasar kerja maka pencari kerja haruslah terdaftar di aplikasi sisnaker untuk mempermudah pendataan.

Terdaftar nya pencari kerja dimaksud agar pendataan terhadap para pencari kerja mudah dilakukan dan pemetaan terhadap para pencari kerja pun dapat dilihat untuk disesuaikan dengan potensi lowongan kerja dimasing-masing daerah.

I.2 Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

I.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan

1. Tersedianya informasi pencari kerja di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Tersedianya informasi lowongan kerja baik di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta lowongan kerja di luar negeri.
3. Terlaksanannya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dari para pencari kerja.

I.4 Sasaran

1. Terdaftaranya para pencari kerja.
2. Terdatanya para pencri kerja.
3. Tersedianya informasi lowongan kerja.

I.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan informasi Pasar Kerja meliputi :

- a. Para pencari kerja.
- b. Perusahaan penyedia lowongan kerja.
- c. BP3MI.
- d. Bursa Kerja Khusus

I.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 47.000.000,-
3. Waktu : 12 (dua belas) bulan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 Bentuk Kegiatan

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Sosialisasi ke SMK se kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan BKK
2. Sosialisasi ke Perusahaan untuk mendaftarkan lowongan kerja ke aplikasi SIAP KERJA maupun informasi manual ke Dinas pembina.
3. Sosialisasi ke pencari kerja tentang informasi lowongan kerja ke Luar Negeri
4. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat terkait semua kegiatan dalam program penempatan tenaga kerja
5. Koordinasi dengan BP3MI terkait PMI.

II.2 Pembiayaan

Seluruh kegiatan ini dibiaya oleh DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan dana sebesar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)

II.3 Keluaran, Hasil dan Capaian Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 Tahun ini telah melaksanakan pembinaan terhadap 12 BKK di SMK se Kabupaten Pesisir Selatan. Penempatan tenaga kerja sebanyak 151 orang, serta 986 pencari kerja terdaftar.

II.4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir selama 1 (satu) tahun dan koordinasi dilakukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, BP3MI, dan Kementerian Tenaga Kerja pada Dirjen Penempatan Tenaga Kerja.

Dari dana Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta) yang dianggarkan untuk Tahun ini telah terlaksana sebanyak 98,17%, meliputi pembelian Alat Tulis Kantor, Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Biasa, serta Honorarium tenaga Administrasi non ASN dengan sisa dana sebanyak Rp.858.040.

II.5 Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Kendala dari pelaksanaan kegiatan ini adalah minimnya dana untuk sosialisasi sehingga tidak dapat mencakup semua unsur. Selain itu sulitnya mengumpulkan data terkait dengan penempatan tenaga kerja karena para pencari kerja tidak melaporkan kembali tentang status pekerjaan mereka setelah mendapatkan kartu AK1.

Perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan pun masih banyak yang tidak melaporkan terkait rekrutmen yang dilakukan.

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Manfaat kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja :

1. Mempermudah para pencari kerja memperoleh informasi lowongan kerja.
2. Sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan ketenagakerjaan
3. Dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu memperoleh pekerjaan sesuai bidang kompetensi.

III.2 Saran

Kegiatan informasi pasar kerja ini agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama para pencari kerja, mengingat geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang membentang memanjang dari utara ke selatan. Untuk itu, sekiranya diperlukan penambahan dana agar kegiatan ini dapat teralisasi dengan baik sehingga dapat memberikan dampak ke pada pencari kerja.

Perlunya sosialisasi berkelanjutan agar informasi serta pengetahuan tentang info lowongan kerja serta kebijakan terkait dengan tenaga kerja dapat tersampaikan ke pada semua pihak terkait. Diperlukannya kesadaran dari berbagai pihak untuk menjalankan ketentuan-ketentuan

yang berlaku agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

PENGUNA ANGGARAN



YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
NIP.19660616/200604 2 025

PPTK

AFRIZAL, SE
NIP.19730418 200801 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064
Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/9/Diskopnaker/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA NOMOR 900/ 01 /SK/PPTK/DISKOPNAKER/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024
TENTANG PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta untuk terlaksananya Program dan Kegiatan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.3.3/04/MP/BKPSDM/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Tentang Mutasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 di Painan Convention Center (PCC) Painan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581).
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023, tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Nomor 900 /16 / Kpts / BPT-PS / 2024, tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU :
Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya terdapat
pada lajur 2 dan 3 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
pada daftar lampiran keputusan ini dilingkungan Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA :
Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai
berikut :
1. Menyiapkan dokumen administrasi (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
 2. Membuat SK tentang Struktur Pelaksana Kegiatan, SK tentang Pembentukan Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa, SK Penerima/Pemeriksaan barang dan jasa jika memakai pihak ketiga
 3. Mengadakan rapat persiapan bersama unsur pengelola kegiatan dalam rangka pembagian tugas / penyiapan rencana kegiatan.
 4. Menyusun rencana kerja kegiatan baik fisik maupun keuangan.
 5. Membuat dokumen KAK dan dokumen pengadaan/dokumen lelang bersama dengan panitia pengadaan barang dan jasa sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan / lelang.
 6. Membuat laporan perkembangan kegiatan fisik maupun keuangan setiap bulannya.
 7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Membuat serah terima hasil pekerjaan pada akhir tahun / setelah pekerjaan selesai dilaksanakan kepada atasan
- KETIGA :
Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT :
Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
- KELIMA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 17 Januari 2024
Kepala Dinas



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660103 199412 1 002

Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 100.3.3/9/Diskopnaker/2024
 Tanggal : 17 Januari 2024
 Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
 MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan		PPTK Untuk Kegiatan Yang Dikelola
	Nama/NIP		
1	2	4	5
1	JAFRI WANDI, S.K.M., M.T NIP. 19710105 199403 1 003	Sekretaris	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2) Penyediaan bahan logistik kantor 3) Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5) Fasilitasi kunjungan tamu 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: 1) Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2	SEPRI PUTRA, S.I.P., M.A.P NIP. 19780911 200801 1 009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	3. AFRIZAL, S.E NIP. 19730418 200801 008	Kepala Bidang Tenaga Kerja	2). Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sub Kegiatan : 1). Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : 1). Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan : 1). Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1). Penyelenggaraan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	---	-----------------------------------	---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.	Ns. WELDEWITA, S.Kep., M.M NIP. 19760616 200801 2 025	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1). Pelasanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1). Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 1). Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 4. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan: 1). Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro 5. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan : 1). Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta
----	--	--------------------------------	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

			Desain dan Teknologi. Pesisir Selatan, 17 Januari 2024 KEPALA DINAS  YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660103 199412 1 002
--	--	--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL, SE
Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS



YANDES AMRIANAL, M.Pd, M.Si
NIP. 19660101 199412 1 002

Painan, 23 Januari 2024
PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG TENAGA KERJA


AFRIZAL, SE
NIP. 19730418 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	100
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	200
		Persentase Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 262.499.840	APBD
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 47.000.000	APBD
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 237.499.900	APBD
Total Anggaran		Rp. 546.999.740	

PIHAK KEDUA
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG TENAGA KERJA

YANDESA MURMANAL, M.Pd, M.Si
 NIP. 19660103 199412 1 002

Painan, 23 Januari 2024
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG TENAGA KERJA

AFRIZAL, SE
 NIP. 19730118 200801 1 008

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KEADAAN BULAN : DESEMBER 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran		Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencarian Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket	Sisa Dana
		Sebelum	Setelah			Jml. Realisasi Keu. SPJ (Rp)	% Keu	s/d Bln. Lalu	s/d Bln. Ini	Target Bln. YAD		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	47.000.000	47.000.000		46.141.960	46.141.960	98,17	96,05	100,00	0,00		858.040
9	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.000.000	47.000.000		46.141.960	46.141.960	98,17	96,05	100,00	0,00		858.040
	<i>Sub Kegiatan</i>											
	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	47.000.000	47.000.000	AFRIZAL SE	46.141.960	46.141.960	98,17	96,05	100,00	0,00		858.040
	a. Belanja Pegawai	12.120.000	-									-
	b. Belanja Barang dan Jasa	34.880.000	47.000.000		46.141.960	46.141.960	98,17	96,05	100,00	0,00		858.040
	c. Belanja Modal											
	Jumlah	47.000.000	47.000.000		46.141.960	46.141.960	98	96	100	-		858.040

KABUPATEN PESISIR SELATAN



PETUNJUK OPERASIONAL dan KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024



KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA



DINAS KOPERASI, UKM, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Instansi | : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Pesisir Selatan |
| 2. Program | : Program Tenaga Kerja |
| 3. Kegiatan | : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Pelayanan Publik |

6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2024
7. Pengguna Anggaran
a. Nama : **JAFRIWANDI, SKM, MT**
b. NIP : 19710105 199403 1 003
c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) :
a. Nama : **AFRIZAL, SE**
b. NIP : 19730418 200801 1 008
c. Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator
1. Jumlah Anggaran : Rp. 47.000.000,-
2. Keluaran : 2.500 orang pencari kerja terdaftar.
3. Hasil : 2.500 orang pencari kerja terdaftar.
4. Kelompok Sasaran : Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Rincian Anggaran Kegiatan yang tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	5 1 01 03 07 0001	B. Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.120.000
2.	5 1 02 01 01 0024	B. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	3.254.964
3.	5 1 02 01 01 0026	B. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak B.	363.036
4.	5 1 02 01 01 0027	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos B. Perj.	-
5.	5 1 02 04 01 0001	Dinas Biasa	8.937.000
6.	5 1 02 04 01 0003	B. Perj. Dinas Dalam Kota	10.325.000
7.	5 1 02 02 01 0026	B Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000
Jumlah			47.000.000

B. PETUNJUK TEKNIS

I. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan tahun 2011, 182 Nagari/Desa sebagai Pemerintah terendah dan 480 Kampung/dusun dengan luas wilayah 5.749,95 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 tercatat sebanyak 516.518 jiwa, laki-laki 260.118 jiwa dan perempuan 256.400 jiwa.

Angkatan kerja di Pesisir Selatan pada tahun 2022 sebanyak 229.994 dengan rincian, Bekerja 219.392 orang dan Pengangguran 10.602 orang dan yang bukan Angkatan Kerja sebanyak 113.527 orang. Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar 4,61 %.

Kondisi saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 1.297 orang pencari yang terdaftar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi pasar kerja maka pencari kerja haruslah terdaftar di aplikasi sisnaker untuk mempermudah pendataan.

Terdaptarnya pencari kerja dimaksud agar pendataan terhadap para pencari kerja mudah dilakukan dan pemetaan terhadap para pencari kerja pun dapat dilihat untuk disesuaikan dengan potensi lowongan kerja dimasing-masing daerah.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Tersedianya informasi pencari kerja di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Tersedianya informasi lowongan kerja baik di dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta lowongan kerja di luar negeri.
3. Terlaksanannya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi dari para pencari kerja.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan :

- a. Terdaftaranya para pencari kerja.
- b. Terdatanya para pencari kerja.
- c. Tersedianya informasi lowongan kerja.

2. Indikator Kegiatan :

Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan informasi Pasar Kerja meliputi :

- a. Para pencari kerja.
- b. Perusahaan penyedia lowongan kerja.
- c. P3MI.
- d. Bursa Kerja Khusus

V. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Dana : Rp. 47.000.000,-
- 3) Jadwal : 12 (dua belas) bulan
- 4) Metode Pelaksanaan Kegiatan :
Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :
 - a. Sosialisasi tentang sistem informasi pasar kerja online ke pencari kerja
 - b. Sosialisasi ke perusahaan untuk menginput informasi lowongan kerja ke aplikasi.
 - c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 5) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
 - c. Memantau hasil kerja tim.
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. MANFAAT

Manfaat kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja :

- 1) Mempermudah para pencari kerja memperoleh informasi lowongan kerja.
- 2) Sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan ketenagakerjaan
- 3) Dapat berinovasi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- 4) Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu memperoleh pekerjaan sesuai bidang kompetensi.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini dibuat untuk jadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, terima kasih.

Painan, Desember 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



AFRIZAL, SE
NIP. 19730418 200801 1 008

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

JOB FAIR KAB.SIJUNJUNG



NOTE 40

24mm f/1.89 1/115s ISO50

MONITORING BKK SMK ADI KARYA RANPES



MONITORING BKK SMK 1 RANAH PESIR



SOSIALISASI BKK DI SMKN 1 RANAH PESIR



RAPAT KOORDINASI DENGAN PENGANTAR KERJA SE SUMATERA BARAT



PENYERAHAN REKOMENDASI PENDIRIAN BKK SMK



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi	2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Program	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Kegiatan	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	Rp. 0,00
Alokasi 2024	Rp. 47.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang	Capaian Program	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	190 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	Keluaran	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					11.370.000,00	11.370.000,00
	[-] BBM Perjalanan Dinas Biasa					0,00					190.000,00	190.000,00
	BBM Spesifikasi : Pertalite	-	Liter	0,00	-	0,00	19 Liter	Liter	10.000,00	-	190.000,00	190.000,00
	[-] Penginapan Jakarta					0,00					1.400.000,00	1.400.000,00
	Penginapan Pejabat Es II/Gol III/Gol II/Gol I Spesifikasi : DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					0,00					8.180.000,00	8.180.000,00
	Tiket Pesawat untuk luar daerah luar provinsi Spesifikasi : Padang - Jakarta	-	pp	0,00	-	0,00	2 Orang	pp	2.500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : DKI Jakarta	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	3.180.000,00
	[-] Transport Lokal					0,00					1.600.000,00	1.600.000,00
	biaya transport lokal Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya	-	Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Hari	Hari	800.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.337.000,00					9.047.000,00	750.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Honorarium non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.898.000,00					12.898.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					2.394.714,00					2.394.714,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					560.000,00					560.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					765.900,00					765.900,00	0,00
	[-] Honorarium Non ASN					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] BBM Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.535.000,00					3.535.000,00	0,00
	[-] Belanja Fotocopy					258.636,00					258.636,00	0,00
	[-] BBM Perjalanan Dinas Biasa					2.187.000,00					2.187.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					94.350,00					94.350,00	0,00
	[-] Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Kota					900.000,00					900.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					12.120.000,00					0,00	-12.120.000,00
	[-] Belanja Jilid					104.400,00					104.400,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					8.900.000,00					8.900.000,00	750.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Biasa					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.330.000,00					5.330.000,00	0,00
	Amplop No. 90 Putih PPS Spesifikasi : Isi 100 lembar	1	Kotak	38.850,00	-	38.850,00	1	Kotak	38.850,00	-	38.850,00	0,00
	Box File Plastik Spesifikasi :	2	Buah	33.300,00	-	66.600,00	2	Buah	33.300,00	-	66.600,00	0,00
	Buku Register Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	2	Buah	37.740,00	-	75.480,00	2	Buah	37.740,00	-	75.480,00	0,00
	Gunting Besar Spesifikasi :	2	Buah	16.650,00	-	33.300,00	2	Buah	16.650,00	-	33.300,00	0,00
	Kertas Folio HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5	Rim	66.600,00	-	333.000,00	5	Rim	66.600,00	-	333.000,00	0,00
	Kertas Quarto HVS 75 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	5	Rim	61.050,00	-	305.250,00	5	Rim	61.050,00	-	305.250,00	0,00
	Kertas Manila Spesifikasi : Ukr : 2 Inchi	250	Lembar	4.662,00	-	1.165.500,00	250	Lembar	4.662,00	-	1.165.500,00	0,00
	Kertas NCR Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	1	Rim	88.800,00	-	88.800,00	1	Rim	88.800,00	-	88.800,00	0,00
	Kertas Nor Putih Spesifikasi :	1	Rim	61.050,00	-	61.050,00	1	Rim	61.050,00	-	61.050,00	0,00
	Lem Kertas Spesifikasi : Ukr. Besar	6	Buah	13.209,00	-	79.254,00	6	Buah	13.209,00	-	79.254,00	0,00
	Map Air Mail Spesifikasi :	1	Pak	38.850,00	-	38.850,00	1	Pak	38.850,00	-	38.850,00	0,00
	Map Buisa Kertas Spesifikasi :	1	Pak	55.500,00	-	55.500,00	1	Pak	55.500,00	-	55.500,00	0,00
	Mata Pisu Cutter k/b Spesifikasi : Isi 12 kotak kecil	1	Pak	61.050,00	-	61.050,00	1	Pak	61.050,00	-	61.050,00	0,00
	Pena Spesifikasi : My gel	1	Lusin	94.350,00	-	94.350,00	1	Lusin	94.350,00	-	94.350,00	0,00
	Penggaris / Roll (Mistar) Spesifikasi : Ukr. 30 cm	2	Buah	6.660,00	-	13.320,00	2	Buah	6.660,00	-	13.320,00	0,00
	Pisau Cutter Besar Merk Kenko Spesifikasi : L. 500	2	Buah	19.980,00	-	39.960,00	2	Buah	19.980,00	-	39.960,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : HD 45	1	Buah	38.850,00	-	38.850,00	1	Buah	38.850,00	-	38.850,00	0,00
	Stapler (jilid hecker) Spesifikasi : 24/6	1	Box	111.000,00	-	111.000,00	1	Box	111.000,00	-	111.000,00	0,00
	Tinta EPSON 003 Cyan Spesifikasi :	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	0,00
	Tinta EPSON 003 Yellow Spesifikasi :	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	0,00
	Tinta EPSON 664 Black Spesifikasi :	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	0,00
	Tinta EPSON 664 Magenta Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	1	Botol	138.750,00	-	138.750,00	0,00
	Cetak lainnya Spesifikasi : Khusus	136	Rupiah	Eksemplar	1,00	136,00	136	Rupiah	Eksemplar	1,00	136,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi :	1034	Lembar	Lembar	250,00	258.500,00	1034	Lembar	Lembar	250,00	258.500,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Soft cover	12	Buah	Eksemplar	8.700,00	104.400,00	12	Buah	Eksemplar	8.700,00	104.400,00	0,00
	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja Spesifikasi : Non ASN	12	Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	12	Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Honorarium PPTK Spesifikasi : 0-100 jt	12	Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	12.120.000,00	-	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	-12.120.000,00
	BBM Spesifikasi : Pertamina	162	Liter	Liter	13.500,00	2.187.000,00	162	Liter	Liter	13.500,00	2.187.000,00	0,00
	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III	2	Orang / Hari	Orang / Hari	275.000,00	550.000,00	2	Orang / Hari	Orang / Hari	275.000,00	550.000,00	0,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b	1	Orang x 2 Kali	Orang / Hari	300.000,00	600.000,00	1	Orang x 2 Kali	Orang / Hari	300.000,00	600.000,00	0,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	1	Orang x 4 Kali	Orang / Hari	275.000,00	1.100.000,00	1	Orang x 4 Kali	Orang / Hari	275.000,00	1.100.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Euron IV/ Golongan III	3 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	250.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	250.000,00	-	3.750.000,00	750.000,00
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Golongan B/PPN/Non ASN	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	225.000,00	-	900.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	225.000,00	-	900.000,00	0,00
	Bantuan transport dalam kota dengan kendaraan umum Spesifikasi : Paman - Raka Selaia	2 Orang	pp	80.000,00	-	160.000,00	2 Orang	pp	80.000,00	-	160.000,00	0,00
	BDM Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	Liter	13.500,00	-	3.375.000,00	250 Liter	Liter	13.500,00	-	3.375.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : KDM, WNDH, Peminan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon IIIa dan IIIb	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Euron IV/ Golongan III	5 Orang x 7 Kali	Orang / Hari	130.000,00	-	4.550.000,00	5 Orang x 7 Kali	Orang / Hari	130.000,00	-	4.550.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan B/PPN/Non ASN	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	120.000,00	-	480.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	120.000,00	-	480.000,00	0,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Euron III/ Golongan IV	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	140.000,00	-	560.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	140.000,00	-	560.000,00	0,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4box	2 Kali	Kali	300.000,00	-	600.000,00	2 Kali	Kali	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	-					47.890.000,00					35.630.000,00	-11.379.909,90
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Roda 4box	3 Kali	Kali	300.000,00	-	900.000,00	3 Kali	Kali	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					363.836,00					363.836,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.325.000,00					10.325.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					12.120.000,00					0,00	-12.120.909,90
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.254.964,00					3.254.964,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.837.000,00					9.687.900,00	750.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.254.964,00					3.254.964,00	0,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					104.400,00					104.400,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					258.636,00					258.636,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.825.000,00					10.825.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.120.000,00					0,00	-12.120.909,90
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				11.370.000,00	11.370.000,00
	Kab. Pesisir Selatan..... Kepala DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA YANDES AMRIANAL, S.Pd, M.Pd., M.Si NIP. 196601031994121002											

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	HADI SUSILO, SSTP., MSi.	197705221997031001	Wakil Ketua II	
2	EMIRGA ZISWATI, SE., MM.	196511111990032006	Sekretaris I	
3	ELIEN SUSI ANDRI, ST.	197707032005012003	Sekretaris II	